

## **Pemanfaatan Potensi Lokal Untuk Mendorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Di Kawasan Pesisir: Studi Kasus Kampung Matara, Kabupaten Merauke**

<sup>1</sup>Syahrabudin Husein Enala, <sup>2</sup>Frederikus Antonius Mana,

<sup>12</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara

e-mail: syahrabudinhuseinenala@unmus.ac.id

Received: 10-10-2025

Accepted: 15-11-2025

Published: 15-12-2025

### **Abstrak**

Pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir menghadapi tantangan kompleks yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kampung Matara di Kabupaten Merauke merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi lokal berupa sumber daya perikanan, kearifan lokal masyarakat adat, serta modal sosial yang kuat, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan potensi lokal Kampung Matara dalam mendorong pencapaian SDGs, khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pekerjaan layak, dan pelestarian ekosistem pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan melibatkan aparat kampung, tokoh adat, nelayan, dan masyarakat pesisir. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi lokal di Kampung Matara telah berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam kebijakan pembangunan kampung. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, akses pasar, serta dukungan kebijakan menjadi faktor penghambat utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola lokal berbasis potensi pesisir dan kearifan lokal merupakan strategi penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Merauke.

**Kata kunci:** *Potensi lokal, pembangunan berkelanjutan, kawasan pesisir*

### **A. PENDAHULUAN**

Kawasan pesisir merupakan wilayah strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan

lingkungan, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut dan pesisir. Wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekologis, tetapi juga sebagai ruang sosial dan ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat lokal melalui sektor perikanan, pengolahan hasil laut, dan aktivitas ekonomi turunan lainnya. Namun demikian, pembangunan di kawasan pesisir masih dihadapkan pada berbagai persoalan struktural, seperti kemiskinan masyarakat pesisir, keterbatasan lapangan kerja yang layak, kerentanan terhadap perubahan iklim, serta degradasi ekosistem laut dan pesisir (Levina et al., 2016; FAO, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pesisir membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam kerangka global, Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi acuan utama pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks kawasan pesisir, setidaknya terdapat empat tujuan SDGs yang sangat relevan, yaitu SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) yang menekankan pengurangan kemiskinan masyarakat pesisir, SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) yang mendorong penciptaan lapangan kerja berbasis ekonomi lokal, SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) yang berkaitan dengan kerentanan wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim, serta SDG 14 (Ekosistem Lautan) yang menekankan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Pencapaian tujuan-tujuan tersebut pada tingkat lokal sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi lokal secara efektif dan inklusif (Sheikhalizadeh & Piralaiy, 2017).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi lokal, seperti sumber daya alam pesisir, kearifan lokal masyarakat adat, serta modal sosial komunitas, merupakan strategi penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan (Chambers, 2014; Bebbington et al., 2018). Di Indonesia, sejumlah penelitian juga menegaskan bahwa pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir (Satria, 2015; Kusumastanto, 2019). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek sektoral, seperti ekonomi perikanan atau konservasi lingkungan, dan belum secara eksplisit mengaitkannya dengan kerangka SDGs sebagai agenda pembangunan global dan nasional.

Kampung Matara di Kabupaten Merauke merupakan kawasan pesisir yang memiliki potensi lokal yang signifikan, terutama pada sektor perikanan tangkap, pemanfaatan hasil laut, serta praktik pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal masyarakat adat. Pengetahuan lokal dalam mengatur ruang tangkap, musim penangkapan, dan relasi manusia dengan alam mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan yang

sejalan dengan prinsip SDGs. Namun, dalam praktik pembangunan, potensi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kampung. Program pembangunan yang ada cenderung bersifat top-down dan belum secara sistematis mengaitkan pemanfaatan potensi lokal dengan pencapaian SDG 1, SDG 8, SDG 13, dan SDG 14.

Penelitian-penelitian sebelumnya di kawasan pesisir Papua dan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pembangunan dan realitas sosial-ekologis masyarakat lokal (Suharto, 2018; BPS Papua Selatan, 2023). Namun, kajian yang secara khusus menganalisis pemanfaatan potensi lokal kampung pesisir dalam kerangka pencapaian SDGs masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya celah pengetahuan (research gap) terkait bagaimana potensi lokal dapat dijadikan instrumen strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat kampung.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan potensi lokal di Kampung Matara dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan SDG 14 (Ekosistem Lautan). Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi analisis potensi lokal kawasan pesisir dengan kerangka SDGs dalam konteks pembangunan kampung di wilayah pesisir Papua Selatan, yang belum banyak dikaji dalam literatur kebijakan dan pembangunan berkelanjutan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pemanfaatan potensi lokal dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kampung Matara, Kabupaten Merauke. Lokasi penelitian dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan karakteristik Kampung Matara sebagai kawasan pesisir yang memiliki potensi lokal serta menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan.

Subjek penelitian terdiri atas 15 informan, yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam pembangunan kampung. Informan tersebut meliputi 3 aparat kampung (kepala kampung dan perangkat), 3 tokoh adat, 5 nelayan, 2 perwakilan kelompok perempuan, serta 2 masyarakat pesisir lainnya yang terlibat langsung dalam aktivitas pemanfaatan sumber daya lokal. Penentuan jumlah informan dilakukan hingga data yang diperoleh mencapai tingkat kejenuhan (data saturation).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interviews), observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk

menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan informan terkait pemanfaatan potensi lokal dan pencapaian SDGs. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas ekonomi pesisir, praktik pengelolaan sumber daya lokal, serta kondisi sosial dan lingkungan Kampung Matara. Studi dokumentasi mencakup dokumen perencanaan pembangunan kampung, laporan kegiatan, serta data pendukung lainnya. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti di lapangan berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2016). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang tinggi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Potensi Lokal Kampung Matara sebagai Basis Pembangunan Berkelanjutan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung Matara memiliki potensi lokal yang signifikan sebagai kawasan pesisir, terutama pada sektor perikanan tangkap, pemanfaatan hasil laut, serta keberadaan kearifan lokal masyarakat adat dalam mengelola sumber daya pesisir. Temuan ini menegaskan posisi Kampung Matara sebagai ruang hidup yang tidak hanya menyediakan sumber penghidupan, tetapi juga membentuk struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, potensi lokal tersebut menjadi modal utama yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, aktivitas perikanan tangkap tradisional merupakan mata pencaharian utama sebagian besar rumah tangga di Kampung Matara. Masyarakat memanfaatkan alat tangkap sederhana dan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan sekitar kampung. Hasil tangkapan umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, sementara kelebihannya dijual di pasar lokal atau kepada pengepul dalam skala terbatas. Pola ini menunjukkan bahwa sumber daya laut berperan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan utama. Kondisi tersebut memperlihatkan keterkaitan langsung antara potensi lokal pesisir dengan pencapaian SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), karena hasil laut menjadi penopang ekonomi rumah tangga masyarakat pesisir.

Selain itu, ketergantungan masyarakat terhadap sektor perikanan juga berkaitan erat dengan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Aktivitas perikanan di Kampung Matara menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, baik sebagai nelayan, pengolah hasil laut, maupun pelaku usaha kecil berbasis hasil perikanan. Meskipun masih bersifat tradisional dan subsisten, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Sejalan dengan pandangan Chambers (2014), penghidupan masyarakat miskin sangat ditentukan oleh kepemilikan dan pemanfaatan aset lokal, termasuk sumber daya alam dan keterampilan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.

Hasil wawancara mendalam dengan nelayan memperkuat temuan tersebut. Laut dipersepsikan sebagai sumber kehidupan utama yang menentukan keberlangsungan ekonomi keluarga. Salah satu informan

menyatakan bahwa “kalau cuaca bagus dan hasil tangkapan banyak, kebutuhan rumah tangga bisa tercukupi, tapi kalau cuaca buruk kami kesulitan”. Pernyataan ini mencerminkan realitas kehidupan masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada kondisi alam. Meskipun potensi lokal tersedia, tingkat kerentanan masyarakat terhadap faktor eksternal masih cukup tinggi. Ketergantungan pada alam menjadikan pendapatan nelayan tidak stabil dan rentan terhadap perubahan cuaca, gelombang laut, serta penurunan kualitas ekosistem pesisir.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi lokal di Kampung Matara belum sepenuhnya mampu menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Ketergantungan pada sektor perikanan tanpa dukungan diversifikasi usaha dan penguatan kapasitas ekonomi menyebabkan masyarakat berada pada posisi yang rentan. Hal ini memperlihatkan bahwa pencapaian SDG 1 dan SDG 8 di kawasan pesisir tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dan kelembagaan lokal dalam mengelola dan mengembangkan potensi tersebut secara adaptif.

Di sisi lain, potensi lokal Kampung Matara juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang kuat. Sumber daya laut tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas dan sistem nilai masyarakat adat. Praktik-praktik lokal dalam memanfaatkan laut mencerminkan hubungan yang erat antara manusia dan alam. Namun, dalam konteks pembangunan modern, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan kampung. Akibatnya, potensi lokal yang seharusnya menjadi basis pembangunan berkelanjutan masih dimanfaatkan secara terbatas dan belum memberikan dampak optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa potensi lokal Kampung Matara memiliki peran strategis sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, tetapi pemanfaatannya masih menghadapi tantangan struktural dan ekologis. Keterbatasan sarana produksi, minimnya akses pasar, serta kerentanan terhadap perubahan iklim menjadi faktor yang membatasi kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan potensi lokal perlu didukung oleh penguatan kapasitas masyarakat, diversifikasi sumber penghidupan, serta integrasi potensi pesisir ke dalam perencanaan pembangunan kampung berbasis SDGs. Dengan pendekatan tersebut, potensi lokal Kampung Matara tidak hanya menjadi sumber penghidupan jangka pendek, tetapi juga menjadi basis pembangunan berkelanjutan yang mampu meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir.

## **2. Kearifan Lokal dan Kontribusinya terhadap SDG 13 dan SDG 14**

Selain potensi ekonomi, penelitian ini juga menemukan adanya praktik kearifan lokal yang masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat adat Kampung Matara dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Kearifan lokal tersebut tercermin dalam aturan-aturan tidak tertulis yang mengatur waktu penangkapan ikan, pembatasan wilayah tangkap tertentu, serta larangan eksploitasi berlebihan terhadap jenis biota laut tertentu. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial, tetapi juga sebagai sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis



komunitas yang bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Matara memiliki pengetahuan lokal mengenai siklus alam, musim penangkapan, dan kondisi perairan. Pengetahuan tersebut diwariskan secara turun-temurun dan menjadi dasar dalam menentukan aktivitas penangkapan ikan. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung menghindari penangkapan pada periode tertentu yang diyakini sebagai masa berkembang biaknya ikan. Pola ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam pengelolaan sumber daya alam, yang sejalan dengan tujuan SDG 14 (Ekosistem Lautan).

Wawancara dengan tokoh adat memperkuat temuan tersebut. Salah satu tokoh adat menyatakan bahwa aturan adat dibuat untuk memastikan laut tetap “hidup” dan dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mengandung nilai keberlanjutan antargenerasi. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, nilai-nilai semacam ini merupakan modal sosial yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir (Bebbington et al., 2018).

Selain berkontribusi terhadap perlindungan ekosistem laut, praktik kearifan lokal di Kampung Matara juga memiliki relevansi dengan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Wilayah pesisir merupakan kawasan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti perubahan pola cuaca, peningkatan gelombang laut, dan penurunan hasil tangkapan. Dalam kondisi tersebut, pengetahuan lokal masyarakat menjadi salah satu bentuk adaptasi berbasis komunitas terhadap perubahan lingkungan. Masyarakat menyesuaikan waktu dan lokasi penangkapan berdasarkan kondisi alam, sehingga dapat meminimalkan risiko dan menjaga keberlanjutan sumber daya.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik kearifan lokal tersebut masih berjalan secara informal dan belum memiliki legitimasi kelembagaan yang kuat. Aturan adat belum terdokumentasi secara sistematis dan belum diintegrasikan ke dalam regulasi kampung atau perencanaan pembangunan jangka menengah. Akibatnya, kearifan lokal masih bergantung pada kepatuhan sosial masyarakat dan belum memiliki kekuatan hukum dalam menghadapi tekanan pembangunan modern, seperti masuknya teknologi penangkapan yang tidak ramah lingkungan atau kepentingan ekonomi eksternal. Kondisi ini berpotensi melemahkan kontribusi kearifan lokal terhadap pencapaian SDG 13 dan SDG 14 dalam jangka panjang.

### **3. Kendala Pemanfaatan Potensi Lokal: Perspektif Ekonomi dan Kelembagaan**

Meskipun Kampung Matara memiliki potensi lokal yang besar, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatannya masih menghadapi berbagai kendala struktural, baik dari sisi ekonomi maupun kelembagaan. Dari perspektif ekonomi, keterbatasan sarana dan prasarana produksi menjadi hambatan utama dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan. Nelayan masih menggunakan alat tangkap sederhana dan perahu tradisional, sehingga jangkauan penangkapan dan volume hasil tangkapan relatif terbatas.

Selain itu, minimnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil laut menyebabkan masyarakat harus segera menjual hasil tangkapan dalam kondisi segar dengan harga yang rendah. Lemahnya akses

terhadap pasar yang lebih luas juga membatasi posisi tawar masyarakat pesisir. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan bergantung pada pengepul lokal, sehingga harga jual hasil laut sangat ditentukan oleh pihak luar. Kondisi ini berdampak langsung pada keterbatasan pencapaian SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), karena aktivitas ekonomi masyarakat belum mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Satria (2015) yang menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan teknologi merupakan faktor utama penghambat pembangunan ekonomi masyarakat pesisir di Indonesia. Tanpa dukungan kebijakan dan investasi yang memadai, potensi lokal cenderung dimanfaatkan secara subsisten dan tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dari sisi kelembagaan, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah kampung belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan potensi lokal ke dalam perencanaan pembangunan berbasis SDGs. Dokumen perencanaan pembangunan kampung, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK), masih bersifat umum dan belum secara eksplisit memetakan potensi lokal terhadap indikator SDG 1, SDG 8, SDG 13, dan SDG 14. Aparat kampung mengakui bahwa keterbatasan kapasitas perencanaan, minimnya pendampingan teknis, serta rendahnya pemahaman mengenai SDGs menjadi faktor penghambat utama.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara agenda pembangunan global dan implementasi kebijakan di tingkat lokal. SDGs belum sepenuhnya dijadikan sebagai kerangka operasional dalam perencanaan pembangunan kampung, sehingga potensi lokal belum dimanfaatkan secara strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

#### **4. Tata Kelola Lokal dan Pentingnya Kolaborasi Multipihak**

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tata kelola pembangunan pesisir di Kampung Matara masih bersifat sektoral dan belum didukung oleh kolaborasi multipihak yang kuat. Pembangunan kampung masih didominasi oleh peran pemerintah kampung dengan keterlibatan aktor eksternal yang terbatas. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendamping, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam penguatan ekonomi pesisir dan pengelolaan sumber daya laut masih belum optimal.

Padahal, dalam perspektif teori collaborative governance, keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh sinergi antaraktor yang memiliki kepentingan dan sumber daya berbeda (Ansell & Gash, 2008). Kolaborasi multipihak memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas, serta penyediaan sumber daya yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah kampung secara mandiri.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Wijaya et al. (2022) dan Umar (2021) yang menegaskan bahwa penguatan kelembagaan lokal dan kolaborasi multipihak merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan di tingkat lokal. Tanpa dukungan kebijakan daerah, pendampingan teknis yang berkelanjutan, serta keterlibatan sektor non-pemerintah, potensi lokal Kampung Matara cenderung dimanfaatkan secara terbatas dan belum mampu

memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal, potensi ekonomi pesisir, dan tata kelola lokal memiliki peran yang saling terkait dalam mendorong pencapaian SDGs di Kampung Matara. Namun, tanpa penguatan kelembagaan dan kolaborasi multipihak yang efektif, potensi tersebut belum mampu berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan kampung, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta membangun kolaborasi lintas aktor guna memastikan keberlanjutan pembangunan pesisir di Kampung Matara.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan potensi lokal di Kampung Matara memiliki peran penting dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di kawasan pesisir. Potensi sumber daya alam, kearifan lokal, dan modal sosial masyarakat merupakan aset strategis yang dapat mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal karena keterbatasan kapasitas kelembagaan, akses pasar, dan dukungan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pembangunan kampung berbasis potensi lokal dan integrasi SDGs secara lebih sistematis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model kebijakan kolaboratif dalam pembangunan pesisir berkelanjutan di wilayah Papua Selatan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Levina, E. (2007). *Adaptation to climate change: International agreements for local needs* (COM/ENV/EPOC/IEA/SLT(2007)6). Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); International Energy Agency (IEA).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi, Cet. ke-38). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sapta, I. K. S., Sudja, I. N., Landra, I. N., & Rustiarini, N. W. (2021). Sustainability performance of organization: Mediating role of knowledge management. *Economies*, 9(3), 97. <https://doi.org/10.3390/economies9030097> (Sheikhalizadeh, M., & Piralaiy, M. (2017). S)
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Edisi revisi, cetakan ke-38. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Triguno. (1997). *Budaya kerja: Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas kerja*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Saimima, N. I. (2021). Nur Ida Saimima, Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik Di Daerah. *HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(1), 19 – 25. Diambil dari <https://e-jurnal.stiaalazka.ac.id/index.php/ojs-hipotesa/article/view/33> (UMAR)
- Wijaya, A., Hamdi, M., Kawuryan, M. W., & Pudjianto, W. S. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI RSUD PRINGSEWU DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Academia Praja*, 5(2), 262 - 277. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.1122>